

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan menjadi salah satu isu terpenting dalam pembangunan serta kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara yang agraris dengan populasi yang sangat besar, harga pangan serta ketahanan pangan menjadi dua aspek yang saling berkaitan (Widarso et al., 2024). Dalam rangka memenuhi standar kualitas hidup masyarakat, ketahanan pangan menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan, dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan serta budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (Dewi et al., 2024). Artinya, ketahanan pangan bukan hanya menyangkut pada ketersediaan pangan, akan tetapi pada keterjangkauan harga, stabilitas pasokan serta kualitas gizi yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, indikator terciptanya ketahanan pangan adalah tersedianya pangan bagi masyarakat (*food availability*), terjangkaunya pangan oleh masyarakat (*food accessibility*), diterimanya pangan oleh masyarakat (*food acceptability*), dipastikan pangan aman untuk dikonsumsi (*food safety*), serta kesejahteraan masyarakat (*People's welfare*) (Widarso et al., 2024).

Situasi ekonomi beras selalu menjadi pusat perhatian utama pemerintah Indonesia sejak era Presiden pertama Ir. Soekarno sampai sekarang. Adapun pidato yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952 tepatnya di Bogor yang terkenal dengan frasa “Soal hidup atau matinya bangsa” terkait dengan persediaan makanan rakyat. Dalam pidato tersebut, secara teknis serta terinci Presiden menjelaskan bahwa besarnya dan perkiraan peningkatan kebutuhan pangan serta

potensi penyediannya, termasuk dari beras. Dan apabila tidak ada paksaan dalam upaya meningkatkan produksi pangan maka negara ini akan terancam kelangsungannya. Presiden Soeharto merespons permasalahan pangan ini, salah satunya dengan menciptakan program Bimbingan Massal (BIMAS) peningkatan usaha tani padi, dengan mengadakan sosialisasi kepada para petani serta memaksa untuk menerapkan teknologi Panca Usaha Tani. Unsur utama dalam Panca Usaha Tani meliputi pemakaian benih varietas unggul yang berkualitas, pengelolaan lahan secara tepat, ketersediaan air yang memadai, peningkatan kesuburan tanah melalui penggunaan air kimia, serta pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman. Dengan adanya dukungan kebijakan intensif ekonomi, pengaturan kelembagaan serta adanya penyuluhan yang intensif, produksi padi meningkat setiap tahun sehingga Indonesia berhasil swasembada beras pada tahun 1984 serta mampu mempertahankannya beberapa tahun setelahnya (Dewi et al., 2024).

Sejak awal era reformasi hingga pemerintahan kabinet kerja, beras tetap dianggap sebagai komoditas penting. Kebijakan pangan beras tidak banyak perubahan, yaitu memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri, menjaga harga gabah agar menguntungkan petani, serta menstabilkan pasokan dan harga sepanjang tahun. Impor hanya dapat dilakukan jika produksi dan cadangan beras tidak mencukupi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ditetapkan target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya dengan menetapkan sasaran pencapaian swasembada beras dalam tiga tahun, atau pada tahun 2017. Seiring perkembangan zaman, petani membuat kualitas hasil pertanian menurun. Serta terdapat perubahan struktur demografi yang kurang menguntungkan sektor pertanian dikarenakan petani semakin menua. Selain itu pentingnya pemupukan dalam meningkatkan produksi, dan pertanian berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, dimana tanah menjadi faktor utama dalam bercocok tanam (A Muhtarom et al., 2023).

Meskipun pada kenyataannya tarik menarik harga antara kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen. Terkadang beras dijual melebihi harga eceran tertinggi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga gabah di tingkat petani,

biaya produksi, serta distribusi meningkat. Selain itu pula perbedaan kualitas beras atau variasi harga yang tidak sesuai aturan. Sehingga membuat penerapan HET tidak selalu berjalan efektif, terutama pada saat pasokan berkurang atau permintaan meningkat. Walaupun adanya operasi pasar dan distribusi beras subsidi masih belum berdampak secara merata. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat, sekaligus memastikan petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Menurut (Bennett, 2019), kebijakan harga merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pasar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Jika kebijakan HET beras berjalan efektif, maka harga beras tidak mengalami lonjakan tajam, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan hal ini berdampak positif terhadap aspek keterjangkauan pangan (*food accessibility*) yang menjadi komponen penting dalam ketahanan pangan.

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama dalam pertanian. Harga pupuk yang tinggi dapat menurunkan kemampuan petani dalam membeli pupuk, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Berdasarkan teori produksi pertanian (Mcarthur & Mccord, 2017) bahwa penggunaan pupuk, benih modern, dan air memiliki peran signifikan dalam meningkatkan hasil tanaman sereal. Mereka menggunakan variabel instrumen yang memanfaatkan variasi harga pupuk global dan jarak transportasi dari pusat produksi pupuk ke wilayah pertanian untuk mengisolasi efek penggunaan pupuk. Hasilnya, pengurangan harga pupuk global menyebabkan peningkatan penggunaan pupuk, yang selanjutnya meningkatkan hasil panen (*yield*). Oleh karena itu, kebijakan subsidi pupuk atau pengendalian harga pupuk merupakan faktor strategis untuk menjaga produksi beras tetap stabil dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan bagi masyarakatnya secara cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Menurut teori ketahanan pangan yang dikemukakan oleh Maxwell dan Smith (1992) dalam (Muhammad et al., 2025), terdapat tiga pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (*availability*), aksesibilitas pangan (*accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*utilization*). Jika kebijakan HET beras efektif dan harga

pupuk terkendali, maka masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, petani mampu meningkatkan produksi, dan pada akhirnya ketahanan pangan di daerah tersebut dapat tercapai.

Kebijakan HET beras dan harga pupuk memiliki hubungan langsung terhadap ketahanan pangan masyarakat. HET beras berperan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, sementara harga pupuk berpengaruh terhadap biaya produksi di tingkat petani. Apabila harga pupuk tinggi, maka biaya produksi meningkat dan dapat mengakibatkan harga jual beras naik. Sebaliknya, apabila HET diberlakukan terlalu rendah tanpa memperhatikan biaya produksi, petani dapat mengalami kerugian. Keseimbangan antara kebijakan HET dan harga pupuk menjadi kunci agar ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga melalui peningkatan produktivitas, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan produksi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, di antaranya fluktuasi harga beras, ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi, serta penurunan produktivitas lahan akibat alih fungsi tanah pertanian. Di Kabupaten Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, produksi padi pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,27 juta ton gabah kering giling, namun biaya produksi meningkat hingga 15% akibat kenaikan harga pupuk non-subsidi. Di Kecamatan Widasari sendiri, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketika harga pupuk naik, pendapatan petani menurun, dan harga beras di pasaran ikut terdorong naik. Kondisi ini secara langsung memengaruhi tingkat ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Dalam satu tahun, petani di wilayah ini dapat melakukan dua kali masa panen. Pada setiap masa panen, dengan lahan seluas 7.000 meter persegi mampu menghasilkan sekitar 6.500 kuintal gabah atau setara dengan 6,5 ton. Jenis gabah yang dihasilkan terdiri dari gabah basah dan gabah kering, di mana gabah basah umumnya dijual langsung ke pabrik setelah panen, sedangkan gabah kering harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu dengan cara dijemur. Dari total hasil panen tersebut,

petani biasanya menyisihkan sekitar 1,5 ton gabah sebagai persediaan pangan untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan sekitar 5 ton sisanya dijual ke pabrik maupun ke luar daerah seperti Kota Cirebon dan Jakarta. Gabah yang disimpan untuk kebutuhan konsumsi umumnya merupakan gabah kering yang dapat bertahan maksimal selama tiga bulan. Setelah melewati batas waktu tersebut, gabah biasanya dijual untuk menghindari penurunan kualitas beras. Berikut data hasil panen di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu:

Tabel 1. 1 Data Hasil Panen Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

Desa	Luas (Ha)	Provitas (Kw)	Produksi (Ton)
Kasmaran	107	71,59	765,96
Leuwigede	137	71,62	981,15
Bunder	156	72,01	1.123,40
Kongsijaya	122	72,37	882,87
Ujungaris	394	71,74	2.826,48
Ujungjaya	323	72,35	2.337,04
Bangkaloa Ilir	197	72,24	1.423,06
Ujungpendokjaya	96	72,27	693,80
Kalensari	195	71,92	1.402,48
Widasari	277	72,40	2.005,46

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Widasari (2025)

Kecamatan Widasari yang terdiri dari 10 desa menunjukkan adanya perbedaan hasil panen di setiap wilayah. Dari 10 desa tersebut, Desa Ujungaris dengan luas lahan 394 hektar dan tingkat produktivitas sebesar 71,74 kuintal per hektar menjadi desa dengan hasil panen tertinggi, yaitu sebesar 2.826,48 ton. Selanjutnya, Desa Ujungjaya menempati posisi kedua dengan luas lahan 323 hektar dan produktivitas sebesar 72,35 kuintal per hektar, dengan total produksi mencapai 2.337,04 ton. Sementara itu, Desa Ujungpendokjaya menjadi desa dengan hasil panen terendah, dengan luas lahan 96 hektar, produktivitas 72,27 kuintal per hektar, dan total produksi sebesar 693,80 ton. Perbedaan hasil panen antar desa ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat produksi pertanian di Kecamatan Widasari. Variasi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan dan pendapatan petani, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian petani di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, cenderung mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Kemandirian pangan ini menjadi salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga petani yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, petani tidak hanya menyimpan hasil panennya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga menjual sebagian besar hasil panen sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, harga jual gabah dan beras di wilayah ini juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan petani. Untuk harga gabah basah, biasanya dijual sebesar Rp7.500 per kilogram, sedangkan gabah kering mencapai Rp8.200 per kilogram. Namun, pada masa panen kedua yang umumnya bertepatan dengan akhir tahun, harga dapat meningkat hingga Rp9.500 per kilogram karena tingginya permintaan. Dalam praktiknya, penjualan hasil panen oleh petani umumnya lebih mengikuti mekanisme harga pasar yang berlaku dibandingkan dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), karena sebagian besar petani menjual dalam bentuk gabah kepada tengkulak atau pabrik penggilingan, bukan langsung dalam bentuk beras ke konsumen akhir. Adapun untuk harga eceran beras di Kecamatan Widasari, terdapat beberapa jenis, yaitu beras premium dengan harga Rp15.000 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, dan beras hajat dengan harga Rp12.000 per kilogram (BPP, 2025). Jika dibandingkan dengan kebijakan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017, dimana HET beras premium ditetapkan sebesar Rp13.900 per kilogram dan beras medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, maka harga beras yang berlaku di Kecamatan Widasari cenderung berada di atas batas HET yang telah ditetapkan. Kebijakan HET ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat, namun kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas pasar, yang dapat berdampak pada keterjangkauan pangan serta tingkat ketahanan pangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga beras di tingkat konsumen cenderung berada di atas kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET), masyarakat di Kecamatan Widasari masih mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri berkat hasil produksi lokal yang melimpah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa kebijakan HET beras belum sepenuhnya menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan harga eceran tertinggi beras terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan harga dan kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

Adapun dalam hal penggunaan pupuk, untuk setiap satu kali masa panen, petani di Kecamatan Widasari memerlukan sekitar 2 kuintal pupuk urea untuk lahan seluas 7.000 meter persegi. Jika dikaitkan dengan luas lahan pertanian di Kecamatan Widasari yang mencapai ratusan hektar di setiap desa serta hasil produksi yang mencapai ribuan ton, maka total kebutuhan pupuk yang digunakan oleh petani juga sangat besar, bahkan dapat mencapai puluhan hingga ratusan ton dalam satu musim tanam. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk menjadi komponen utama dalam menunjang tingginya produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Harga pupuk urea sebesar Rp240.000 per 100 kilogram untuk jenis pupuk medium (sering disebut pupuk merah), sedangkan pupuk premium dapat mencapai Rp500.000 per 100 kilogram. Selain itu, terdapat juga jenis pupuk biasa dengan harga sekitar Rp180.000 per kuintal. Umumnya, petani lebih banyak menggunakan pupuk medium karena dianggap seimbang antara kualitas dan biaya (BPP, 2025). Harga pupuk memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya produksi padi. Ketika harga pupuk mengalami kenaikan, beban biaya petani juga meningkat. Namun, tidak semua petani menjadikan harga pupuk sebagai patokan utama; sebagian tetap memilih pupuk berkualitas tinggi demi menjaga hasil panen yang optimal, sementara sebagian lainnya memilih pupuk dengan harga lebih murah sehingga berpotensi memengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga pupuk berpotensi memengaruhi biaya

produksi, hasil panen, serta pada akhirnya berdampak pada tingkat ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.

Secara ideal, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sementara harga pupuk yang terkendali diharapkan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa harga beras di Kecamatan Widasari masih cenderung berada di atas batas HET yang telah ditetapkan, serta harga pupuk yang relatif tinggi menyebabkan meningkatnya beban biaya produksi bagi petani. Kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas tersebut berpotensi memengaruhi tingkat ketahanan pangan masyarakat, baik dari sisi keterjangkauan maupun ketersediaan pangan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahim et al., 2024) yang berjudul *Dinamika Ketahanan Pangan*. Analisis pengaruh luas panen padi, konsumsi beras, harga beras, dan jumlah penduduk terhadap produksi padi di Wilayah Sentra padi di Indonesia Tahun 2017-2020. Menyatakan bahwasanya dalam pengujian secara parsialnya variabel Harga beras berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produksi padi di Wilayah Sentra padi di Indonesia Tahun 2017-2020. Adapun penelitian yang mengkaji hal serupa yang dinyatakan oleh (VilentineTessalonicaA.W., 2023) yang berjudul *Pengaruh konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ketahanan pangan Nasional*. Menyatakan bahwasanya aspek keterjangkauan yang berupa produktivitas padi, konsumsi beras dan harga konsumsi protein memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketahanan pangan Indonesia pada periode 2018-2021. Dari dua penelitian di atas belum ada yang meneliti antara variabel kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk terhadap ketahanan pangan masyarakat. Walaupun dari penelitian terdahulu dengan realitas yang terjadi memiliki salah satu diantara beberapa variabel yang sama. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui

apakah variabel kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk berpengaruh atau tidak terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Meskipun di kecamatan widasari termasuk kedalam daerah yang memiliki kontribusi yang dominan dalam penghasil padi akan tetapi penelitian di daerah ini masih minim dan didasarkan pada research gap yang ada menunjukkan secara bersamaan variabel belum ada yang menguji antara variabel kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk terhadap ketahanan pangan sehingga penelitian tentang pengaruh kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu perlu diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Pengaruh Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras Dan Harga Pupuk Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Harga beras di Kecamatan Widasari masih melebihi batas HET yang ditetapkan pemerintah.
2. Harga pupuk yang tinggi meningkatkan biaya produksi dan memengaruhi produktivitas petani.
3. Fluktuasi harga beras dan biaya produksi berpotensi memengaruhi ketahanan pangan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Adapun Batasan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wilayah penelitian ini hanya difokuskan di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang dimana dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi padi di Provinsi Jawa Barat.
2. Objek penelitian ini adalah masyarakat petani padi yang secara langsung terdampak oleh penerapan kebijakan harga eceran tertinggi beras dan fluktuasi harga pupuk.

3. Variabel yang diteliti hanya meliputi dua variabel independen, yaitu kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk, serta satu variabel dependen, yaitu ketahanan pangan masyarakat.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor lain diluar kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk seperti luas lahan, curah hujan, dan tingkat konsumsi pangan, dikarenakan penelitian ini difokuskan untuk menguji pengaruh antara kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk terhadap ketahanan pangan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras berpengaruh terhadap Ketahanan Pangan masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
2. Apakah Harga Pupuk berpengaruh terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
3. Apakah Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras dan Harga Pupuk secara bersamaan berpengaruh terhadap Ketahanan pangan Masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Kebijakan harga eceran tertinggi beras terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- b. Mengkaji dan menganalisis pengaruh harga pupuk terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- c. Mengkaji dan menganalisis pengaruh kebijakan harga eceran tertinggi beras dan harga pupuk secara bersamaan terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang memiliki

kepentingan terhadap kebijakan harga pangan dan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memperdalam pemahaman mengenai pengaruh kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi pertanian, khususnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan harga pupuk dalam mendukung stabilitas sistem pangan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa pada wilayah atau periode yang berbeda, sehingga dapat memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara kebijakan harga dan ketahanan pangan

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Widasari, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait HET beras dan harga pupuk guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Bagi petani dan pelaku usaha pertanian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya stabilitas harga input dan output dalam menjaga keberlanjutan produksi. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran kebijakan harga dalam menjaga keterjangkauan pangan. Selain itu, bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam kajian ekonomi pertanian, kebijakan publik, dan ketahanan pangan daerah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pemahaman dan memberikan gambaran umum pada pembaca tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan secara garis besar berkaitan dengan permasalahan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini akan dijelaskan landasan atau kajian teori mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan grand theory, literature review, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan membahas rencana dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan peneliti bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dijelaskan dan dianalisis.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi peneliti.